

ABSTRAK

Nama : M. Irwansyah
NIM : 2010622025
Judul Tesis : Urgensi Moralitas Penegak Hukum dalam Penyelesaian Perkara Tindak Pidana Penipuan dan Penggelapan yang dikualifikasikan Sebagai Tindak Pidana Pencucian Uang
Kata Kunci : Moralitas, Penyidik Polri, Kode Etik Profesi Polri.

Penegakkan hukum oleh penyidik Polri dalam menyelesaikan perkara tindak pidana penipuan dan penggelapan yang dikualifikasikan sebagai tindak pidana pencucian uang, sesuai dengan putusan Praperadilan Nomor: 33/Pid.Prap/2020/PN.Jkt.Sel., tidak memenuhi ketentuan mekanisme penyelidikan dan penyidikan sebagaimana diatur dalam ketentuan Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2019 Tentang Manajemen Penyidikan Tindak Pidana, ketentuan tersebut sangat berguna untuk acuan penanganan perkara supaya mengurangi adanya pelanggaran/ketidaksesuaian penanganan perkara, sehingga sangat tepat dalam penelitian hukum ini menggunakan metode yuridis normatif. Bahwa ketidaksesuaian penanganan perkara tindak pidana, dalam praktiknya dilatar belakangi karena kurangnya penghayatan aparat penegak hukum mengimplementasikan moral yang terdapat dalam ketentuan Peraturan kepala Kepolisian Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2011 Tentang Kode Etik Kepolisian Negera Republik Indonesia. Bahwa kurangnya pemahaman dan kesadaran masyarakat terhadap hukum masih rendah, juga berimbas terhadap tindakan yang tidak sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, oleh karena itu hadirnya penelitian hukum ini untuk menjawab permasalahan moral tersebut agar menjadi aparat penegak hukum yang profesional dan mengedepankan nilai moralitas. Hal itu dapat dilakukan dengan beberapa cara untuk menanggulangnya yakni: 1. Menanamkan kesadaran disiplin penyidik Polri 2. Membangun sistem kerja yang obyektif, profesional, dan mengedepankan penguasaan bidang 3. Membangun sistem kerja koordinasi sesama anggota Polri 4. Mengedepankan sikap moralitas yang terkandung dalam pedoman kode etik profesi Polri 5. Serta sistem pengawasan terhadap kinerja penyidik Polri yang obyektif dan profesional. Bahwa lima (5) poin itulah cara dan solusi dalam menanggulangi permasalahan penegakkan hukum dalam penelitian ini, supaya sesuai dengan tujuan hukum yakni: keadilan, kepastian dan kemanfaatan.

ABSTRACT

Nama : M. Irwansyah
NIM : 2010622025
Judul Tesis : The Urgency of Law Enforcement Morality in the Settlement of Criminal Cases of Fraud and Embezzlement which are qualified as Money Laundering Crimes
Kata Kunci : Morality, police investigators, Police professional code of ethics.

Law enforcement by Police investigators in resolving criminal cases of fraud and embezzlement which are qualified as money laundering crimes, in accordance with Pretrial decision Number: 33/Pid.Prap/2020/PN.Jkt.Sel., does not meet the provisions of the investigation and investigation mechanism as regulated in the provisions of the Regulation of the Head of the State Police of the Republic of Indonesia Number 6 of 2019 concerning Management of Criminal Investigations. This discrepancy is motivated by the lack of appreciation of law enforcement officers in implementing the morals contained in the provisions of the Regulation of the Chief of the Indonesian National Police Number 14 of 2011 concerning the Code of Ethics of the Indonesian National Police. That the lack of understanding and public awareness of the law is still low, it also affects actions that are not in accordance with applicable legal provisions, therefore the presence of this legal research is to answer these moral problems in order to become professional law enforcement officers and prioritize moral values. This can be done in several ways, namely: 1. Instilling awareness of the discipline of Polri investigators 2. Building an objective, professional work system, and prioritizing mastery of the field 3. Building a coordination work system among Polri members 4. Prioritizing the morality contained in the guidelines Police professional code of ethics 5. As well as an objective and professional monitoring system for the performance of Polri members. That the 5 (five) points are the ways and solutions in tackling legal problems in this study, so that they are in accordance with the objectives of law enforcement, namely: justice, certainty and expediency.